



Laporan Keanggotaan UD Pulau Mas dalam Seafood Savers

Ringkasan perkembangan perbaikan perikanan
oleh UD Pulau Mas periode (Oktober 2017) –
(Maret 2018)

Munawir dan Achmad Mustofa (Capture Fisheries,
Yayasan WWF-Indonesia)

Informasi Umum

UD Pulau Mas dalam proses bisnisnya menerapkan praktik perikanan yang bertanggungjawab dengan mempertimbangkan skema supply chain tertutup atau hanya membeli dari anggota yang terdaftar. Melalui sistem ini perusahaan lebih mudah untuk memantau hasil produksi dan mengontrol nelayan yang menjual ikan ke Unit Penanganan Ikan (UPI) nya. Selain itu, UD Pulau Mas berencana akan menetapkan sistem kuota untuk anggota nelayannya dan melalui sistem ini pembagian kuota akan mudah untuk diimplementasikan. Konsep awal yang disampaikan oleh pimpinan UD Pulau Mas mengenai kuota ini adalah dengan memperhatikan jumlah tangkapan ikan oleh nelayan pada tahun sebelumnya.

“Kalau ada nelayan yang menjualkan ikan milik non-anggota, otomatis akan mengurangi kuota dia sendiri”. Ujar Heru Purnomo, owner.

Bersama dengan WWF Indonesia, UD Pulau Mas melaksanakan implementasi perbaikan perikanan melalui pelatihan Better Management Practices (BMP) komoditas ikan kerapu untuk salah satu kelompok nelayan dampingan tim site WWF di Wakatobi (South and Eastern Sulawesi Seascape/ SESS). Kelompok tersebut adalah Antapulo yang mayoritas anggotanya berdomisili di Tomia. Kelompok ini menyumbang sekitar 40% total produksi UD Pulau Mas di Wakatobi. Pelatihan dilaksanakan di bulan Juni 2016 untuk 20 orang anggota kelompok Antapulo. Peningkatan pengetahuan kelompok berdasarkan nilai pre dan post-test adalah 15,61%.

Selanjutnya untuk memantau praktik nelayan terhadap kesesuaian dengan prinsip-prinsip konservasi pada BMP, dilaksanakanlah penilaian tingkat kepatuhan praktik perikanan nelayan kelompok Antapulo pada bulan Februari 2017 dengan nilai kepatuhan awal (t_0) sebesar: 71,22%. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, beberapa masalah utama yang perlu ditingkatkan oleh kelompok nelayan adalah pencatatan hasil tangkapan dan pendaftaran armada kapal.

Perihal pencatatan hasil tangkapan, memang UD Pulau Mas telah menerapkan sistem pencatatan berbasis digital dengan menggunakan perangkat IBM. Namun demikian, perlu bagi nelayan untuk mengetahui secara mandiri hasil tangkapan ikan kerapu dan jenis-jenis ikan lain yang tertangkap sebagai upaya untuk berkontribusi dalam pengelolaan perikanan di Wakatobi. Oleh karena itu, pasca penilaian compliance, tim WWF melaksanakan pelatihan pengisian logbook kepada nelayan anggota Antapulo. Hal ini dimaksudkan agar nelayan lebih mengerti arti penting mengetahui hasil tangkapan dan familiar dengan form pendataannya.

Sementara itu, untuk pendaftaran armada kapal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa kapal perikanan berapapun ukurannya harus memiliki pas kecil dan Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) atau SHTI apabila produk diekspor ke US dan Eropa. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, hampir semua armada belum tercatat di Dinas Perikanan Kab Wakatobi. WWF Indonesia mendorong perusahaan dan mendampingi nelayan dalam proses ini.

Selain dua hal yang masih perlu ditingkatkan tersebut, kelompok telah melaksanakan beberapa hal yang positif diantaranya adalah legalitas kelompok yang sudah ada, alat tangkap ramah lingkungan, dan menerapkan ukuran minimal tangkapan.

Perikanan ikan karang di Wakatobi terutama ikan kerapu, dalam beberapa tahun ini telah menunjukkan tren penurunan hasil tangkapan. Untuk mencoba menggali informasi lebih dalam dan kuat secara ilmiah, dilakukanlah kajian *Historical Catch* yang melibatkan seluruh stakeholder di Wakatobi. Pendataan ini dilead oleh WWF Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui riwayat penangkapan kerapu di Wakatobi. Riwayat penangkapan ini yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun dokumen pemanfaatan perikanan (Harvest Strategy) ikan kerapu di Wakatobi.

Selain di Pulau Tomia, pada bulan Juni 2017 Tim site WWF Wakatobi bersama UD Pulau Mas juga melakukan implementasi perbaikan perikanan di Pulau Wanci kepada 2 kelompok yaitu Kelompok Sanggeh Kami dan Kelompok Mitra Sunu yang juga merupakan suplayer UD Pulau Mas di Kab Wakatobi. Melalui pelatihan BMP komoditas Ikan Kerapu Kakap kepada 2 kelompok nelayan yang berasal dari suku Bajo di Kecamatan Mola ini Tim site WWF Wakatobi melakukan transfer pengetahuan seputar peraturan dan teknis penangkapan yang ramah lingkungan. Dari hasil pre dan post test pada saat pelatihan BMP diketahui adanya peningkatan pengetahuan sebesar 15,62%.

Beberapa program perbaikan yang dijalankan kepada ke 2 kelompok diatas antara lain penguatan kelompok serta legalitas kelompok untuk mendorong kemandirian kelompok, pencatatan hasil tangkapan melalui skema logbook dan juga update informasi serta peraturan seputar praktik penangkapan ikan kerapu dan kakap. Dari informasi dilapangan diketahui juga praktik penangkapan yang dilakukan oleh nelayan anggota kelompok Mitra Sunu dan Sanggeh Kami sudah dikategorikan ramah lingkungan, dimana dapat dilihat dari alat tangkap yang digunakan yaitu pancing ulur serta ukuran hasil tangkapan seperti yang dipersyaratkan oleh UD Pulau Mas.

Pendampingan teknis juga turut diberikan dari DKP Kab Wakatobi melalui skema pertemuan bulanan kelompok. Dengan adanya pendampingan teknis ini menjadi momen bagi nelayan untuk berdiskusi terkait aktifitas penangkapan ikan kerapu kakap serta menjadi media update informasi kepada pemerintah dalam implementasi program perikanan yang sedang atau akan disusun kedepannya.

Pada bulan Februari 2018, Tim Seafood Savers bersama Tim site WWF Wakatobi melakukan penilaian tingkat kepatuhan kepada 2 kelompok nelayan anggota UD Pulau Mas yaitu kelompok Mitra Sunu dan Kelompok Sanggeh Kami. Dari hasil penilaian didapatkan nilai compliance awal (T_0) untuk kelompok Mitra Sunu yaitu : 71,88 %. Secara umum pengetahuan tentang teknis penangkapan ikan karang yang ramah lingkungan sudah diketahui dengan baik oleh anggota kelompok ini, mulai dari alat tangkap yang digunakan hanya jenis pancing ulur (handline) sampai dengan ukuran ikan yang layak ditangkap dan diambil untuk dijual. Sedangkan hal-hal yang masih perlu diperbaiki yaitu pada sikap saat melakukan aktifitas penangkana yaitu dengan tidak membuang sampah dilaut, pembersihan kapal sebelum dan setelah penangkapan dilakukan serta pengetahuan terkait wilayah larangan menangkap yang telah ditetapkan oleh otorita setempat (Balai TN Wakatobi).

Selain kelompok Mitra Sunu, Kelompok Sanggeh Kami juga dinilai untuk mengetahui tingkat kepatuhan awal (T_0) dari anggotanya terhadap standar BMP yang telah disusun oleh WWF Indonesia. Dari hasil penilaian didapatkan nilai compliance sebesar 73, 32%. Seperti halnya kelompok Mitra Sunu, kelompok Sanggeh Kami juga masih memiliki beberapa hal yang perlu dikuatkan seperti pentingnya menyiapkan alat-alat keselamatan sebelum melakukan aktivitas penangkapan, dan tidak membuang sampah dilaut.

Rincian evaluasi keanggotaan UD Pulau Mas berdasarkan *Fisheries Improvement Program (FIP)* yang telah dilaksanakan:

AKTIVITAS/TUGAS	OUTPUT DAN INDIKATOR UNTUK AKTIVITAS/TUGAS	PENYELENGGARA & MITRA	SEAFOOD SAVERS stage		HASIL EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT/ KENDALA
			INTERMEDIATE	ADVANCE		
1.1.1. Memfasilitasi proses pengembangan EAFM dan/atau regulasi lain yang mendukung prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan.	Tersedianya peraturan menteri mengenai EAFM dan peraturan lain yang mendukung prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan	SDI, P4KSI, Agen KKP di Kabupaten & Provinsi			<p>Pengelolaan Perikanan melalui pendekatan ekosistem di Indonesia telah mendapatkan pengakuan pemerintah dan telah dilegalkan melalui Surat Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap No. 18/ Kep-DJPT/ 2014*</p> <p>*Download Link : http://infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum</p> <p>Pemerintah mengatur alat tangkap trawl dan seine nets melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/ 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela</p>	Perusahaan belum banyak terlibat langsung dalam kegiatan EAFM. Walaupun begitu, secara tidak langsung perusahaan turut menyumbangkan data hasil produksi di lokasi keramba yang dijadikan sumber penilaian EAFM misalnya di kawasan Taman Nasional Takabonerate; Taman Nasional Wakatobi; dan Kabupaten Manggarai Barat

					(trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia* *Download link : http://infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum	
1.1.2. Mengembangkan peraturan perusahaan untuk mendukung implementasi EAFM dan/atau peraturan lain yang mendukung prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan.	Perusahaan telah memiliki kebijakan mengenai implementasi EAFM dan peraturan lain yang terkait dengan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan	Perusahaan			<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan melakukan pencatatan hasil tangkapan nelayan menggunakan software yang dikembangkan oleh IBM dan melaksanakan pemasangan instrumen pendataan pada seluruh keramba • Perusahaan hanya membeli ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan (handline) • Perusahaan menetapkan ukuran minimal tangkapan nelayan yaitu 500 gram 	Perusahaan masih belum bersedia membuka data via IBM untuk diolah


<p>1.2.1 Memfasilitasi peraturan Provinsi/Kabupaten sebagai interpretasi dari peraturan kementerian mengenai rencana pengelolaan perikanan, yang mencakup Kaidah Pengendalian Penangkapan (Harvest Control Rule)</p>	<p>Tersedianya peraturan Provinsi/Kabupaten sebagai ekstensi dari rencana pengelolaan perikanan dengan harvest strategy</p>	<p>SDI, P4KSI, Dinas, PLN, KKJI, PSDP</p>			<p>Harvest Strategy belum diaplikasikan karena masih dikembangkan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	<p><i>Bersama dengan Subdit LPTK, WWF Indonesia mengembangkan pedoman umum Harvest Strategy untuk komoditas perikanan non tuna. Proses saat ini sudah sampai pada pelatiha, draft awal sudah tersedia dan menunggu finalisasi di tahun 2017</i></p>
<p>1.2.2. Perusahaan mengimplementasikan tindakantindakan seperti bagaimana diatur dalam rencana pengelolaan Provinsi/Kabupaten sebagai patron dalam perkembangan dan implementasi pada area tersebut. Rencana tersebut akan mencakup harvest control rule yang melibatkan prinsip keberlanjutan, contoh ukuran tangkap minimal, menyesuaikan jumlah usaha mengikuti kapasitas menampung stok</p>	<p>Perusahaan menjadi pioneer dalam mendukung perkembangan dan implementasi dari rencana pengelolaan Provinsi/Kabupaten yang melibatkan harvest control strategy-nya</p>	<p>Perusahaan</p>			<p>Harvest Strategy belum diaplikasikan karena masih dikembangkan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	<p><i>mengenai implementasi yang sesuai dengan pedoman umum (pedum) penyusunan harvest strategy, perusahaan memang belum 100% comply dengan metode yang ada dalam pedum tersebut. Hal ini dikarenakan pedum memang belum disosialisasikan. Namun perusahaan secara aktif mengirimkan wakilnya di Wakatobi untuk ikut serta dalam pelatihan historical catch yang diadakan oleh WWF Indonesia. Selain itu, kebijakan internal perusahaan mengenai pembatasan ukuran tangkap, melakukan pencatatan, dan berencana akan menerapkan sistem kuota merupakan prinsip dasar dalam pedum harvest strategy.</i></p>

<p>1.2.3 Memfasilitasi peraturan Provinsi/Kabupaten sebagai ekstensi dari regulasi EAFM dan regulasi nasional lain yang mendukung prinsip perikanan ikan karang yang berkelanjutan</p>	<p>Tersedianya peraturan Provinsi/Kabupaten sebagai ekstensi dari regulasi EAFM dan regulasi nasional lain yang mendukung prinsip perikanan ikan karang yang berkelanjutan</p>	<p>SDI, P4KSI, Dinas, PLN, KKJI, PSDP</p>		<p>Kabupaten Manggarai Barat menggunakan indikator pada EAFM untuk menyusun Naskah Akademis yang menjadi dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan Berkelanjutan di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat. UD Pulau Mas memiliki 2 lokasi keramba yang masuk kedalam wilayah perairan tersebut yaitu di Pulau Mesa dan Pulau Sababi. Proses Ranperda sendiri saat ini sedang dibahas Oleh biro hukum DPRD Kab. Manggarai Barat</p> <p>Download Link Naskah Akademis Ranperda Mabar : http://bit.ly/1HWO9aH</p> <p>Download Link Ranperda Mabar : http://bit.ly/1ARYi2D</p> <p>Kabupaten Wakatobi menggunakan indikator pada EAFM untuk menyusun Naskah Akademis yang menjadi dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan Berkelanjutan di wilayah perairan Kabupaten Wakatobi. UD Pulau Mas memiliki 2 lokasi keramba yang masuk kedalam</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>wilayah perairan tersebut yaitu di Pulau Tomea dan Pulau Wangi-Wangi. Proses Ranperda sendiri saat ini sedang dibahas Oleh biro hukum DPRD Kab. Wakatobi</p> <p>Download Link Naskah Akademis Ranperda Wakatobi :-</p> <p>Download Link Draft Ranperda Wakatobi :</p> <p>http://bit.ly/1DvxRXm</p> <p>Kabupaten Flores Timur menggunakan indikator pada EAFM untuk menyusun Naskah Akademis yang menjadi dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan Berkelanjutan di wilayah perairan Kabupaten Flores Timur. Ranperda tersebut saat ini sudah ditandatangani oleh Bupati dan sudah resmi menjadi Peraturan Bupati Kab. Flores Timur tentang Perikanan Berkelanjutan</p> <p>Download Link Naskah Akademis Ranperda Flotim :</p> <p>Download Link untuk Perbup Flores Timur :</p> <p>http://bit.ly/1CqDYfT</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>1.2.4 Perusahaan mengimplementasikan langkahlangkah sebagaimana diatur dalam panduan EAFM Indonesia dan/atau regulasi nasional lain yang mendukung prinsip perikanan ikan karang yang berkelanjutan, sebagai patron dalam proses perkembangan dan implementasi dari EAFM pada tingkat Provinsi/Kabupaten</p>	<p>Perusahaan menjadi pioneer dalam mendukung perkembangan dan implementasi dari regulasi EAFM dan/atau regulasi lain yang mendukung prinsip perikanan ikan karang berkelanjutan di Provinsi/Kabupaten</p>	<p>Perusahaan</p>		<p>Kabupaten Manggarai Barat menggunakan indikator pada EAFM untuk menyusun Naskah Akademis yang menjadi dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan Berkelanjutan di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat. UD Pulau Mas memiliki 2 lokasi keramba yang masuk kedalam wilayah perairan tersebut yaitu di Pulau Mesa dan Pulau Sababi. Proses Ranperda sendiri saat ini sedang dibahas Oleh biro hukum DPRD Kab. Manggarai Barat. UD Pulau Mas berpartisipasi aktif dalam penyediaan data dalam Naskah Akademis. Download Link Naskah Akademis Ranperda Mabar : http://bit.ly/1HWO9aH Download Link Ranperda Mabar : http://bit.ly/1ARYi2D</p>	<p>Belum banyak terlibat dalam kegiatan terkait dengan EAFM atau kegiatan yang serupa. Undangan beberapa kali dikirimkan namun belum bisa hadir mengirimkan perwakilannya</p>
<p>1.3.1 Pengembangan dan adopsi dari rencana pengelolaan ikan karang di area tersebut</p>	<p>Rencana pengelolaan ikan karang telah tersedia dan telah di adopsi</p>	<p>SDI, agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Universitas Hasanudin Makassar</p>		<p>Dokumen Rencana Kerja Perikanan Karang di Indonesia telah tersedia Download link : http://bit.ly/1DvWIA1</p>	<p><i>Dokumen Reef Fish Action Plan telah tersedia, adopsi pada praktek perikanan perusahaan masih dilakukan dalam koridor FIP dengan WWF Indonesia</i></p>

<p>1.3.2 2 Perusahaan secara aktif mendukung dan mengimplementasikan rencana pengelolaan (e.g. menyediakan surat rencana pengelolaan, secara aktif menghadiri pertemuann jika dibutuhkan)</p>	<p>Perusahaan menjadi pioneer yang mendukung pengembangan dan pengimplementasian rencana pengelolaan perikanan sesuai area</p>	<p>Perusahaan</p>		<p>Perusahaan terlibat dalam penyusunan RPP oleh Pemerintah yang diadakan pada tanggal 10-12 Maret 2015 di Universitas Terbuka, Tangerang Selatan Link Undangan : http://bit.ly/19v6HDI Dokumentasi :</p> 	<p><i>Dokumen RPP berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan saat ini sedang diproses di biro hukum KKP sebelum diimplementasikan sebagai lampiran dalam Peraturan Menteri. Permasalahan utama adalah ketidakadaan kuota dalam RPP tersebut, untuk mengantisipasi hal ini, dilaksanakan penyusunan protokol pendugaan stok ikan bersama dengan Komnaskajiskan</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					
				<p>WWF Indonesia terlibat dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan 713, 714, dan 715*</p> <p>*Download Link : dokumen belum final, masih berada dalam proses diskusi oleh Biro Hukum KKP</p>	
<p>1.4.1 Menginisiasi workshop pada TURF (atau pengukuran RBM lainnya) yang juga akan mengidentifikasi pengukuran untuk pengembangan mekanisme</p>	<p>TURF (atau pengukuran RBM lainnya) untuk mencegah <i>overfishing</i> sudah diadopsi</p>	<p>SDI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Komunitas Nelayan, Organisasi Lingkungan, Universitas</p>		<p>Mekanisme TURF saat ini sedang dikembangkan oleh tim WWF bersama dengan Pemerintah untuk site Koon</p>	

1.4.2 Implementasi TURF (atau langkah RBM lain) untuk mengelola perikanan	TURF (or other RBM measures) management to avoid <i>overfishing</i> is implemented	KKJI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Komunitas Nelayan, Organisasi Lingkungan			Mekanisme TURF saat ini sedang dikembangkan oleh tim WWF bersama dengan Pemerintah untuk site Koon	
1.4.3 Perusahaan memfasilitasi implementasi mekanisme TURF (atau langkah RBM lainnya)	Perusahaan menjadi pioneer dalam pengimplementasian TURF (atau langkah RBM lainnya)	Perusahaan			<i>Belum dilaksanakan</i>	Mekanisme TURF saat ini sedang dikembangkan oleh tim WWF bersama dengan Pemerintah untuk site Koon
1.5.1 Mengumpulkan dan mengevaluasi semua informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah system no take zone, baik untuk yang baru atau yang sudah ada	Tersedianya laporan yang mencakup informasi mengenai karang mana yang menopang perikanan dan karang mana yang tidak menopang no take zone	KKJI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Komunitas Nelayan, Organisasi Lingkungan			<p>Buku Kawasan Konservasi Perairan yang diterbitkan oleh direktorat KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan tersedia Download Link : http://bit.ly/2uXDTAM</p> <p>Peta sebaran Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia tersedia Download Link : http://bit.ly/2uXDTAM</p> <p>Perusahaan membangun kebijakan berupa pelarangan bagi anggotanya untuk menangkap di zona inti (TBC)</p>	Pada tahap ini masih sebatas melaksanakan Inventarisasi no take zone

<p>1.5.2 Menentukan <i>no take zone</i> dengan peraturannya untuk mendukung perikanan yang bertanggungjawab.</p>	<p>Area no take zone dan regulasi untuk mendukung perikanan yang bertanggungjawab telah dikembangkan</p>	<p>KKJI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Komunitas Nelayan, Organisasi Lingkungan</p>		<p>Buku Kawasan Konservasi Perairan yang diterbitkan oleh direktorat KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan tersedia Download Link : http://bit.ly/2uXDTAM</p> <p>Peta sebaran Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia tersedia Download Link : http://bit.ly/2uXDTAM</p> <p>Perusahaan membangun kebijakan berupa pelarangan bagi anggotanya untuk menangkap di zona inti (TBC) Download Link :</p>	<p>Law enforcement masih rendah</p>
<p>1.5.3 Implementasi hasil delineasi zona</p>	<p>No take zone yang baru telah diimplementasikan dan berfungsi secara penuh</p>	<p>KKJI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Komunitas Nelayan, Organisasi Lingkungan</p>		<p>Buku Kawasan Konservasi Perairan yang diterbitkan oleh direktorat KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan tersedia Download Link : http://bit.ly/2uXDTAM</p> <p>Peta sebaran Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia tersedia Download Link : http://bit.ly/2uXDTAM</p>	

					Perusahaan membangun kebijakan berupa pelarangan bagi anggotanya untuk menangkap di zona inti (TBC)	
2.1.1 Memfasilitasi ketersediaan peraturan (e.g. peraturan kementerian) yang mendukung sub FKPPS dan/atau otoritas pengelolaan nasional (e.g. satuan tugas) sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan perikanan ikan karang\	Otoritas perikanan ikan karang nasional untuk mengkoordinasi implementasi pengelolaan dari rencana pengelolaan perikanan berbasis area di tingkat provinsi/kabupaten	SDI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Organisasi Lingkungan, Pemangku Kepentingan			<i>Belum dilaksanakan</i>	
2.1.2 Secara aktif melibatkan industry, agen penelitian, dan Organisasi Lingkungan dalam pertemuan terkait pengambilan keputusan dalam perikanan	Otoritas pengelolaan perikanan dan rencana pengelolaan perikanan berbasis area bersifat kredibel dan didukung oleh semua pemangku kepentingan	SDI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, Organisasi Lingkungan, Pemangku Kepentingan			<i>Belum dilaksanakan</i>	
2.1.3 Perusahaan secara proaktif mendukung dan terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional dan provinsi/kabupaten (e.g. menghadiri pertemuan)	Perusahaan to be pioneer to support the development and implementation of area based fishery management plan in Indonesia	Perusahaan			<i>Belum dilaksanakan</i>	

<p>2.1.4 Memonitor dan evaluasi kinerja dari otoritas pengelolaan Provinsi/Kabupaten yang dilakukan oleh agen internal dan eksternal dari KKP dari Provinsi/Kabupaten yang bertanggungjawab untuk pengelolaan perikanan ikan karang</p>	<p>Otoritas Provinsi/Kabupaten pengelolaan perikanan ikan karang berfungsi dengan baik untuk mengimplementasikan langkah-langkah pengelolaan dari rencana pengelolaan perikanan berbasis area</p>	<p>di Provinsi dan Kabupaten, komunitas, pemangku kepentingan, Organisasi Lingkungan</p>			<p><i>Belum dilaksanakan</i></p>	
<p>2.2.1 Memfasilitasi ketersediaan peraturan (peraturan kementerian, peraturan direktorat jendral, dll) mengenai alokasi deskripsi pekerjaan kepada agen yang tepat untuk mendukung pengelolaan perikanan</p>	<p>Tugas yang didefinisikan untuk semua pemangku kepentingan, Satker Perikanan Ikan Karang, KKP, DKP Provinsi dan Kabupaten serta Komunitas</p>	<p>SDI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, komunitas, pemangku kepentingan, Organisasi Lingkungan</p>			<p><i>Belum dilaksanakan</i></p>	
<p>3.1.1 Workshop mengenai stock assessment; meliputi metodologi dan analisi pengumpulan data serta rencan sinkronisasi</p>	<p>Peran yang lebih jelas seputar agensi mana yang melakukan aktifitas terkait serta metodologi apa yang digunakan untuk stock assessment</p>	<p>P4KSI, BPPL dan universitas lokal</p>			<p>Pendugaan stok menggunakan Risk Based Framework sudah dilaksanakan, laporan tersedia Protokol pendugaan stok sedang dikembangkan oleh Komnaskajiskan</p>	
<p>3.1.2 Pelatihan mengenai stock assessment, biologis perikanan dan kapasitas penangkapan ikan</p>	<p>otoritas terkait stock assessment memiliki kapasitas untuk melakukan stock assessment menggunakan metodologi yang disetujui</p>	<p>P4KSI, BPPL dan universitas lokal</p>			<p>Pendugaan stok menggunakan Risk Based Framework sudah dilaksanakan, laporan tersedia</p>	

3.1.3 Mengembangkan kebijakan perusahaan terkait komitmen untuk mendukung pengumpulan data stock assessment dengan memfasilitasi aktivitas penelitian dan menyediakan akses ke fasilitas produksi (logbook, wawancara, sample gonad, dll)	Perusahaan menjadi pioneer dalam menyalurkan komitmennya untuk mendukung pengumpulan data terkait stock assessment ikan karang di Indonesia	Perusahaan			Masih sebatas melaksanakan Risk Based Framework (PSa/ SICA) : Laporan tersedia	
3.2.1 Melakukan tinjauan ilmiah pada indicator stok ikan karang	Informasi mengenai indicator dan status tok ikan karang tersedia (informasi biologis ikan, dll)	P4KSI, BPPL dan universitas lokal			Telah dilaksanakan kegiatan kajian status stok untuk perikanan karang di lima lokasi di Indonesia bekerjasama dengan Universitas Diponegoro Download Link :	Penelitian lain yang terkait
3.3.1 Workshhop pelatihan mengenai risk assessment, termasuk simulasi	Manajer dan peneliti perikanan memahami dan telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan risk assessment	P4KSI, BPPL, DKP, dan Universitas Hasanudin Makasar, Organisasi Lingkungan, Komunitas, Pengepul, Proessor			Workshop untuk pendugaan stok perikanan melalui PSA dan SICA telah dilaksanakan di lima lokasi di Indonesia	
3.3.2 Melaksanakan <i>Risk Based Assessment</i>	Informarmasi mengenai RBF yang diterapkan pada seluruh spesies target, ikan umpan dan <i>bycatch</i> tersedia	P4KSI, BPPL, DKP, dan Universitas Hasanudin Makasar, Organisasi Lingkungan, Komunitas, Pengepul,			Workshop dan laporan untuk pendugaan stok perikanan melalui PSA dan SICA telah dilaksanakan dan tersedia untuk lima lokasi di Indonesia	

		Proessor				
3.4.1 Studi mengenai LRP untuk kerapu dan kakap	Tersedianya LRP untuk kerapu dan kakap telah diidentifikasi	P4KSI/BPPL Universitas di Makassar			Bekerjasama dengan Yvone Sadovy untuk melaksanakan riset dan kajian di lokasi keramba	Hasil riset tidak dishare oleh UD PM
3.4.2 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data dengan memfasilitasi aktivitas penelitian dan membebrikan akses ke fasilitas produksi perusahaan (e.g. Logbook, interview, gonad sampling, dll)	Perusahaan menjadi pioneer dalam mendukung pengumpulan data mengenai <i>stock assessment</i> untuk ikan karang di Indonesia	Perusahaan			Perusahaan berpartisipasi aktif dalam menyediakan data untuk kajian stock status melalui metode PSA dan SICA yang dilaksanakan oleh tim Universitas Diponegoro	
3.5.1 P4KSI dan universitas local akan melaksanakan studi mengenai usaha terbaik yang diperbolehkan npada perikanan dan solusi untuk mengurangi usaha	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya laporan mengenai studi yang mencakup informasi mengenai jumlah usaha yang dipeprbolehkan untuk ditangkap dalam area terkait dan solusi yang direkomendasikan untuk mengurangi usaha Menyediakan dokumen akademis untuk merekomendasikan reduksi usaha	DKP Provinsi dan kabupaten			<i>Belum dilaksanakan</i>	

3.5.2 Pemerintah local akan mengembangkan peraturan dan memfasilitasi implementasi untuk mengurangi usaha	Peraturan Provinsi/Kabupaten mengenai reduksi usaha telah tersedia dan difungsikan mengikuti rekomendasi ilmiah	P4KSI, BPPL, DKP, dan Universitas Hasanudin Makasar, Organisasi Lingkungan, Komunitas, Pengepul, Proessor			<i>Belum dilaksanakan</i>	
3.5.3 Perusahaan berpartisipasi dalam implementasi peraturan pada rantai suplai	Perusahaan menjadi pioneer dalam mengimplementasikan peraturan dari reduksi usaha	Perusahaan			Menerapkan peraturan pelarangan penggunaan sianida dan kompressor pada beberapa lokasi keramba sesuai dengan peraturan daerah yang ada (ex : Manggarai Barat)	
3.6.1 Workshop ke pemangku kepentingan lain mengenai pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologi pengumpulan data dari stock assessment dilatih kepada pemangku Kepentingan Stakeholders berkomitmen untuk membantu proses pengumpulan data 	P4KSI, BPPL, SDI, Universitas, Industri (langsung dari haji dan perusahaan pembeli)			<i>Belum dilaksanakan</i>	
3.6.2 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data dengan memfasilitasi aktifitas penelitian dan memberikan akses ke fasilitas produksi perusahaan (e.g. Logbook, interview, gonad sampling, dll)	Perusahaan menjadi pioneer dalam mendukung pengumpulan data mengenai stock assessment untuk Ikan Karang di Indonesia	Perusahaan			Belum dilaksanakan, keterlibatan minim	

3.6.3 P4KSI melaksanakan analisis dan pelaporan data	Laporan mengenai produktivitas stok tersedia	P4KSI			<i>Belum dilaksanakan</i>	
3.7.1 Memperbaiki modul pelatihan observer/enumerator yang sudah ada, terutama mengenai laporan data <i>bycatch</i> (Data yang sudah ada perlu lebih rinci)	Modul pelatihan diperkaya	SDI, KKJI, P4KSI, Universitas, PLN, KAPI, Agen KKP Provinsi dan Kabupaten			<i>Belum dilaksanakan</i>	
3.7.2 Pelatihan observers/enumerator	Observers/enumerator memiliki kapasitas untuk melaksanakan pengumpulan data	P4KSI, BPPL			<i>Belum dilaksanakan</i>	
3.7.3 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data untuk stock assessment dengan memfasilitasi aktivitas penelitian dan memberikan akses kepada observer/enumerator untuk bekerja di kapal penangkap dan pengumpul ikan, yang juga melibatkan universitas lokal dan komunitas	Perusahaan menjadi pioneer dalam mendukung pengumpulan data untuk <i>bycatch</i> melalui mekanisme observer/enumerator	Perusahaan			Menerapkan sistem IBM dalam keramba yang langsung dilakukan oleh kepala keramba Menerapkan sistem IBM dalam keramba yang langsung dilakukan oleh kepala keramba Menerapkan sistem IBM dalam keramba yang langsung dilakukan oleh kepala keramba	ketidaksediaan sharing data
3.8.1 Metodologi untuk system monitoring habitat telah diidentifikasi dan pelatihan dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> Metodologi monitoring telah diidentifikasi Pelatihan telah dilaksanakan dan human resources sebagai pelaksana monitoring telah tersedia	KKJI, NGO, Universitas, Agen KKP Provinsi dan Kabupaten, Pembeli/Processor			<i>Belum dilaksanakan</i>	

3.8.2 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data untuk monitoring habitat	Perusahaan menjadi pioneer atas pengumpulan data untuk habitat	Perusahaan			Memfasilitasi tim peneliti dari UNDIP pada beberapa lokasi (Togean, Kei, Banggai laut) untuk melaksanakan stock assessment dengan metode SICA	Laporan tersedia
3.8.3 Sistem monitoring dilaksanakan setiap tahunan	Laporan tahunan mengenai monitoring habitat tersedia dan digunakan sebagai bagian dari pengelolaan karang	KKJI, NGO, Universitas, Agen KKP Provinsi dan Kabupaten, Pembeli/Prosesor				
3.9.1 Universitas local melaksanakan studi terkait	Laporan mengenai efek dari perikanan rawai dasar dan pancing ulur pada ekosistem tersedia	BPPL, Universitas Hasanudin di Makassar			Laporan PSA-SICA untuk perikanan karang tersedia	
3.10.1 Melaksanakan tinjauan assessment	Tersedianya laporan tinjauan yang juga digunakan untuk perbaikan pengelola dan penelitian	Independent reviewer				
4.1.1 Memfasilitasi pembentukan dari PokMasWas, mempersiapkan pengawasan dan rencana monitoring praktik penangkapan ikan (termasuk institutional dan capacity building)	Laporan regular per 6 bulan mengenai kinerja POKMASWAS tersedia	PSDP, Agen KKP Provinsi dan Kabupaten/PO MASWAS			KKP melalui PSDKP memiliki kelompok pengawas masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Data pokmaswas tersedia.	
4.1.2 Monitor kinerja dari PokMasWas sebagai bagian dari system pengelolaan	6 months regular report on the performance of POKMASWAS available	PSDP, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten/POK MASWAS			Data belum didapatkan	

4.1.3 Perusaha mengembangkan kebijakan untuk mendukung pembentukan dan pengoperasian PokMasWas	Perusahaan menjadi pioneer dalam implementasi POKMASWAS	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya, masih menginduk pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah	
4.2.1 Memfasilitasi pemerintah dalam memperbaiki sanksi dari peraturan, memperbaiki mekanisme pengawasan, dan penegakan pelanggaran hukum	Tersedianya regulasi untuk memastikan agar pelanggaran hukum berkurang	PSDP/MMAF Legal Department				
4.2.2 Sosialisasi dari legislasi mengenai sanksi untuk pemangku kepentingan dari perikanan ikan karang	Legislasi mengenai sanksi telah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan yang menangkap ikan di perikanan ikan karang pesisir	PSDP/Departemen legal KKP, Nelayan				
4.2.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan mengenai implementasi dari legislasi	Perusahaan menjadi pioneer dalam implementasi legislasi terkait	Perusahaan			Menerapkan beberapa peraturan terkait sustainable fisheries di kerambanya <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran minimal tangkap - Alat tangkap selektif - Larangan penggunaan sianida dan kompresor 	
4.3.1 Memfasilitasi pelatihan mengenai pengawasan kepada PokMasWas dan PSDP di tingkat Provinsi dan Kabupaten	Petugas pengawasan dan POKMASWAS telah terlatih	DKP District, BPPL, WWF and Proesor			<i>Laporan belum didapatkan MSC</i>	
4.3.2 Memfasilitasi sinkronisasi workplan dengan pemangku kepentingan terkait pengawasan lain untuk memperbaiki penegakan dan pengawasan	Workplan telah tersinkronisasi dan mendukung pengawasan kolaboratif	DKP District, BPPL, WWF dan proesor, semua pemangku kepentingan				

<p>4.3.3 Pelatihan mengenai langkah-langkah pengelolaan (spesies target, reduksi <i>bycatch</i> dan konsekuensi dari interaksi ekosistem) bagi penangkap ikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan BMP untuk praktik perikanan Berkelanjutan • Menggunakan BMP untuk meningkatkan kualitas ikan tinggi untuk mengurangi <i>overfishing</i> • Menggunakan BMP untuk mitigasi <i>bycatch</i> <p>Laporan kketerlacakan</p>	<p>Kapasitas nelayan meningkat terkait praktik-praktik perikanan berkelanjutan, menghasilkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan • Peningkatan kualitas ikan yang mengurangi <i>overfishing</i> • <i>bycatch</i> ETP & juveniles berkurang • Berkurangnya IUU <i>fishing</i> • 	Perusahaan			<p><i>Pelatihan BMP telah dilaksanakan pada beberapa lokasi keramba, misalnya di Selayar, Tolitoli, Toge</i></p>	<p><i>dokumen cetak BMP terbatas dan masih dalam proses revisi</i></p>
<p>4.3.4 Perusahaan mengembangkan kebijakan yang mendukung penegakan petugas yang bekerja di lapangan</p>	<p>Perusahaan menjadi pioner dalam mendukung penegakan aktifitas oleh entitas komunitas dan legal</p>	Perusahaan			<p><i>Belum dilaksanakan</i></p>	
<p>4.4.1 Memfasilitas pengumpulan dari laporan mengenai kepatuhan terhadap peraturan</p>	<p>Tersedianya kompilasi laporan mengenai kepatuhan terhadap peraturan sampai tingkat pemerintah</p>	PSDP, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten			<p><i>Belum dilaksanakan</i></p>	
<p>4.4.2 Memfasilitasi pengunggahan laporan ke situs KKP</p>	<p>Laporan regular per 6 bulan tersedia di situs KKP</p>	PSDP, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten			<p>Link to the website : http://djpsdkp.kkp.go.id/</p>	

4.4.3 Perusahaan pengembangkan kebijakan terkait pengumpulan data pendukung dan persiapan laporan mengenai pelanggaran peraturan	Perusahaan menjadi pioneer dalam mendukung pengawasan untuk perikanan	Perusahaan			<i>Belum dilaksanakan</i>	
Telah terlibat di dalam studi mengenai kesempatan dan tantangan dari subsidi perikanan di Indonesia untuk mendukung perikanan berkelanjutan	Laporan studi tersedia	PDN, PLN, BBRSE			<i>Belum dilaksanakan</i>	
Terlibat dalam studi subsidi perikanan	Perusahaan menjadi pioneer dalam studi subsidi perikanan di Indonesia	Perusahaan			Belum dilaksanakan	Sejauh ini UD Pulau Mas aktif dalam aktivitas yang dilaksanakan WWF terutama jika ada kunjungan dan keterbukaan dalam membagi informasi kepada stakeholder